

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1981.

Afandi H.A., *Faktor-Faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, Jakarta: Babinkum TNI, 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan ke-5, Jakarta: Kencana, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017.

Buaton, Tiarsen, *Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Depok: Rajagrafindo, Persada.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2011.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012.

Kadir, Muhamad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2007.
- M. Friedman, Lawrence, *American Law: An Introduction*, Second edition, New York: WW Norton & Company, 1998.
- M. Reskodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan & Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, 1994.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: Djambatan, 2013.
- Pramono, Budi, *Peradilan Militer Indonesia*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Riadi, Edi, *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS*, Jogjakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013.
- Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: CV Indra Djaja, 1976.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: UI, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

B. Artikel Jurnal dan Hasil Penelitian

Jurnal Media Administrasi, Vol. 6, No. 1, , E-ISSN: 2962-6358 P-ISSN: 2503-1783, Arif Fahmi Lubis, “Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum”, (2021): 67-77.

Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu, Vol 2, No 1, (2024), 37- 51., Tiarsen Buaton, Agustinus Purnomo Hadi, Prastopo, Ateng Karsoma, M. Ali Ridho, “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System)”.

Lex Crimen, Vol.2, No.2, Tomy Dwi Putra, “Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, 2013, 7.

Ragil Jaka Utama, “*Analisis Hukum Kewenangan Absolut Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*”, (Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Tentara (*Staatsblad* 1934, Nomor 167) Dengan Keadaan Sekarang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 79-K/PM.III-18/AD/V/2013 perihal Putusan Tingkat Pertama Perkara Prada Aryadi Fokatea.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Nomor 75-K/PM.III/BDG/AD/IX/2013 perihal Putusan Tingkat Banding Perkara Prada Aryadi Fokatea, 21 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 K/MIL/2014 perihal Putusan Tingkat Kasasi Perkara Prada Aryadi Fokatea, 27 Februari 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 312/Pid.B/2017/PN RBi
perihal Putusan Tingkat Pertama Perkara M. Arkam, 20 Februari 2018

Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 49-K/PM I-05/AD/X/2019
perihal Putusan Tingkat Pertama Perkara Prada Muarif, 13 Desember
2019.